

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampong Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

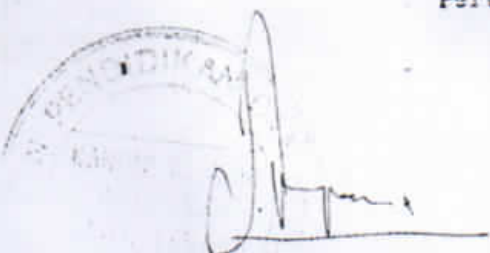


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH	12. SMA Negeri 21 Bandung	-	Lengkong	Kotamadya Bandung	
		13. SMA Negeri 4 Tasikmalaya	-	Cihideung	Kabupaten Tasikmalaya	
		1. SMA Negeri 2 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMA Negeri Maos	-	Maos	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.23.01.03.120
		3. SMA Negeri Bukatejo	-	Bukatejo	Kabupaten Purbalingga	09.1.2.1038.23.01.03.140
		4. SMA Negeri 3 Tegal	-	Tegal	Kotamadya Tegal	09.1.2.1038.23.01.03.210
		5. SMA Negeri Bantarkawung	-	Bantarkawung	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.220
		6. SMA Negeri Kaliwungu	-	Kaliwungu	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.230
		1. SMA Negeri Karangnongko	SMA Penda Karangnongko/Yayasan Pembinaan Penda Karangnongko	Karangnongko	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.232
		2. SMA Negeri 2 Sukoharjo	SMA Univ. 11 Maret	Kartosuro	Kabupaten Sukoharjo	09.1.2.1038.23.01.03.233
						09.1.2.1038.23.01.03.250
						09.1.2.1038.23.01.03.340
						09.1.2.1038.23.01.03.360



1	2	3	4	5	6	7
22.	BENGKULU Pembukaan	1. SMA Negeri Ipuh 2. SMA Negeri Tais	- -	Muko-muko Selatan Seluma	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Selatan	09.1.2.1038.23.01.26.110 09.1.2.1038.23.01.26.120 09.1.2.1038.23.01.26.140 09.1.2.1038.23.01.26.210 09.1.2.1038.23.01.26.220 09.1.2.1038.23.01.26.230 09.1.2.1038.23.01.26.231 09.1.2.1038.23.01.26.232 09.1.2.1038.23.01.26.233 09.1.2.1038.23.01.26.250 09.1.2.1038.23.01.26.340 09.1.2.1038.23.01.26.360
23.	TIMOR TIMUR Pembukaan	1. SMA Negeri Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem	09.1.2.1038.23.01.27.110 09.1.2.1038.23.01.27.120 09.1.2.1038.23.01.27.140 09.1.2.1038.23.01.27.210 09.1.2.1038.23.01.27.220 09.1.2.1038.23.01.27.230 09.1.2.1038.23.01.27.231 09.1.2.1038.23.01.27.232 09.1.2.1038.23.01.27.233 09.1.2.1038.23.01.27.250 09.1.2.1038.23.01.27.340 09.1.2.1038.23.01.27.360



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO MIRJOPRASANTO